



**Membangun Etika Digital Kewargaan dalam Kehidupan Politik Warga Negara**

**Randiawan<sup>✉1</sup>, Hasnawi Haris<sup>✉2</sup>, M. Yunasri Ridhoh<sup>✉3</sup>, Winda Nurul Annisa<sup>✉4</sup>**

Informasi artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel : Diterima Mei 2025 Revisi Juni 2025 Dipublikasikan Juli 2025</p>	<p>Perkembangan globalisasi dalam bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi semakin pesat dan cepat. Perkembangan ini membuat semakin terbukanya perilaku masyarakat baik dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik. Artikel ini fokus dalam kajian membangun Etika digital Kewargaan dalam Kehidupan politik warga negara. Perilaku warga negara dalam perkembangan digital mesti di barengi dengan perkembangan etika digital kewargaan terutama dalam ranah politik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi membangun etika digital kewargaan yang sangat krusial untuk menjaga integritas proses politik dan demokrasi. Dan untuk mengetahui dampak minimnya etika digital kewargaan dalam kehidupan politik warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, pengumpulan data menggunakan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak minimnya etika digital kewargaan dalam aktivitas politik karena interaksi yang bersifat politis melalui media sosial yang cenderung negatif dan provokatif, media sosial menjadi alat politik yang dapat menimbulkan perpecahan atau konflik dalam masyarakat. Kondisi semacam ini dapat menimbulkan Polarisasi politik yang semakin mendalam antara kelompok- kelompok yang memiliki identitas politik berbeda. Perlu untuk membangun strategi dengan menerapkan pilar literasi digital, seperti <i>digital skill</i>, <i>digital culture</i>, <i>digital ethics</i>, dan <i>digital safety</i>. Jika literasi digital tertanam dalam diri setiap pengguna media sosial, maka kemungkinan besar kehidupan digital akan menjadi lebih baik dan lebih beradab (<i>civilized</i>). Etika digital kewargaan dengan menerapkan konsep <i>respect other</i>, <i>educate your self</i>, dan <i>protect your self</i> melalui <i>civic literacy</i> dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan seperti video-video singkat berisikan pesan- pesan penting yang berkaitan dengan pembangunan etika digital kewargaan sertasosialisasi dilingkungan sekolah, kampus, dan masyarakat dalam bentuk pengabdian.</p>
<p>Keywords : Etika Digital, Pendidikan Kewarganegaraan, Kehidupan Politik Warga Negara</p>	<p><b>ABSTRACT</b></p> <p><b><i>Building Digital Ethics Citizenship in the Political Life of Citizens.</i></b> The development of globalisation in the fields of technology, information, and communication is becoming increasingly rapid and fast-paced. This development has led to greater openness in people's behaviour in social, cultural, and political life. This article focuses on the study of building digital citizenship ethics in the political life of citizens. Citizens' behaviour in the digital age must be accompanied by the development of digital citizenship ethics, particularly in the political sphere. The aim of this research is to identify strategies for building digital citizenship ethics, which are crucial for maintaining the integrity of political processes and democracy. It also seeks to understand the impact of the lack of digital citizenship ethics in the political life of citizens. This study employs a qualitative approach with a descriptive method, using literature review for data collection. The results of this study indicate the impact of the lack of digital citizenship ethics in political activities due to political interactions through social media that tend to be negative and provocative. Social media has become a political tool that can cause division or conflict in society. Such conditions can lead to deeper political polarisation between groups with different political identities. It is necessary to develop strategies by implementing pillars of digital literacy, such as digital skills, digital culture, digital ethics, and digital safety. If digital literacy is instilled in every social media user, then digital life is likely to become better and more civilised. Digital citizenship ethics can be promoted by applying the concepts of respecting others, educating oneself, and protecting oneself through civic literacy in citizenship education lessons, such as short videos containing important messages related to the development of digital citizenship ethics, as well as socialisation within schools, campuses, and communities in the form of community service.</p>
<p><b>How to Cite :</b> Randiawan., Haris. H., Ridhoh. Y.M., Annisa, N.W. (2025). Membangun Etika Digital Kewargaan dalam Kehidupan Politik Warga Negara. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 10(2), pp. 97-108. DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v10.n2.2025.pp97108">http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v10.n2.2025.pp97108</a></p>	

---

✉ **Alamat korespondensi:** [randiawan@unm.ac.id](mailto:randiawan@unm.ac.id)

Universitas Negeri Makassar<sup>1,2,4</sup>, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Makassar, Indonesia  
Universitas Negeri Makassar<sup>3</sup>, Manajemen, Makassar, Indonesia

---

✉ **E-mail:**

[randiawan@unm.ac.id](mailto:randiawan@unm.ac.id)<sup>1</sup>; [hasnawiharis@unm.ac.id](mailto:hasnawiharis@unm.ac.id)<sup>2</sup>; [yunasri.ridhoh@unm.ac.id](mailto:yunasri.ridhoh@unm.ac.id)<sup>3</sup>,  
[windanurulannisa@unm.ac.id](mailto:windanurulannisa@unm.ac.id)<sup>4</sup>

---

Copyright © 2025 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

## PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dalam bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi semakin pesat dan cepat, Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang disebut era digital. Perkembangan ini membuat semakin terbukanya perilaku masyarakat baik dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik (Afriansyah dkk., 2024; Setiawan dkk., 2024). Era digital telah mengubah cara warga negara berfikir, bertindak, bersosialisasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik (Jakak dkk., 2023). Perilaku warga negara dalam perkembangan digital perlu di barengi dengan perkembangan etika digital kewargaan.

Beberapa penelitian yang relevan dengan topik kajian dalam artikel ini bahwa etika digital bukan hanya menjadi respons terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi komitmen untuk membentuk individu yang secara positif berkontribusi dalam masyarakat digital global (Roza, 2020; Khairunisa dkk., 2024). Dapat dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan terus-menerus, seorang dan menanamkan nilai-nilai fundamental kewarganegaraan. Melalui hal tersebut Indonesia dapat melangkah maju sebagai negara yang tidak hanya unggul secara teknologi, tetapi juga dikenal sebagai masyarakat yang beretika dan responsif terhadap perubahan, menjaga harmoni dalam keberagaman budaya, serta mempromosikan keadilan dan perdamaian di tengah dinamika era digital.

K. Bertens (dalam Astuti, 2021) mendefinisikan etika sebagai sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Siberkreasi & Deloitte (dalam Kusumastuti dkk., 2021) memberikan pendapat bahwa etika digital (digital ethics) dipandang sebagai kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquet) dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa menggunakan media digital mestinya diarahkan pada suatu niat, sikap, dan perilaku yang etis untuk kebaikan bersama. Hal

ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan. Terutama di Indonesia yang multikultural, maka etika digital sangat relevan dipahami dan dipraktekkan oleh semua warga Indonesia.

Teknologi, informasi, dan komunikasi sangat merubah cara individu dalam berinteraksi dengan sesama warga negara. Era digital membentuk ruang baru dalam partisipasi sosial dan politik warga negara yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Platform digital seperti media sosial, internet, dan platform media lainnya justru memungkinkan keterlibatan politik yang lebih luas, tentunya juga menimbulkan tantangan terkait privasi, keamanan data, dan kesenjangan digital (Castells, 1996; Hanafi & Ardianto, 2024).

Argumentas diatas memberikan gambaran bahwa globalisasi dapat memberikan dampak dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk etika digital kewargaan (Rejeki dkk., 2025), Konsep ini muncul sebagai konsep kewarganegaraan transnasional yang memberikan gambaran keterikatan individu dengan individu yang lain bahkan lebih luas keterhubungan individu dan warga negara global, serta pengaruh budaya global terhadap kehidupan politik warga negara (Giddens, 1990; Held, 1995). Politik tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum. Lebih jauh dari itu politik merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kerangka aktivitas masyarakat dan negara (Nursetiani dkk., 2024). Politik dan warga negara dua hal yang tidak mungkin untuk dipisahkan, keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain dalam aktivitas partisipasi politik. Berbicara tentang politik pasti tidak lepas kaitannya dengan demokrasi. Era digital menjadi ruang untuk warga negara mengikuti proses aktivitas politik. Oleh karena itu, pentingnya membangun etika digital kewargaan sebagai penunjang dalam membangun proses politik yang baik dan sehat.

Schwab (2017) mengemukakan pendapatnya bahwa era digital tentunya sangat memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pada sektor ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Misalnya dalam sektor politik, era digital membuka ruang untuk partisipasi publik dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil keputusan politik. Kewargaan digital merupakan konsep yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab individu dalam menggunakan teknologi digital serta memanfaatkannya untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi (Choi, 2016; Baruch & Erstad, 2018). Media digital tentunya sangat berperan dalam ranah demokrasi, pemanfaatan berbagai media digital yang ada dipergunakan sebagai praktik demokrasi yang ditujukan untuk masyarakat dengan tujuan mempermudah untuk mengetahui dan mengakses berbagai informasi yang ada (Nur, 2020). Partisipasi warga negara sebagai aktivitas politik menjadi sangat penting dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Etika kewargaan dibangun sebagai salah satu dasar membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*).

Kewargaan digital diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami pentingnya partisipasi politik di era digital dan meningkatkan kesadaran mereka sebagai kontrol sosial bagi berjalannya pemerintahan (Matang & Riyanti, 2023). Era globalisasi membawa banyak perubahan, termasuk dalam dunia politik, indonesia perlu beradaptasi dengan tren global dengan mengutamakan pengembangan etika warga negara sebagai landasan dalam kehidupan politik (Mustari & Hashfi, 2024). Membangun etika digital kewargaan perlu adanya upaya yang tersistematis dan terkontrol baik dari lingkungan pendidikan formal dan informal. Sehingga perlu membuat kajian analitis mengenai topik etika kewargaan digital seperti yang akan dibahas dalam artikel ini.

Menghadapi isu kontemporer mengenai etika digital kewargaan memerlukan analisis kritis terhadap berbagai desain teknologi digital, cara orang berinteraksi dengan komunikasi digital sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ditanamkan dalam desain teknologi tersebut (Brough dkk., 2018; Literat & Brough, 2019). Perlu menciptakan lingkungan digital yang etis dan bertanggung jawab. Pendekatan ini akan mencakup pemahaman tentang konsep etika digital, peran pendidikan dalam membentuk karakter warga negara digital, serta kebijakan yang dapat mendukung praktek-praktek etis dalam kehidupan politik digital. Selain itu, analisis ini juga akan mengkaji dampak dari etika digital terhadap partisipasi politik,

keterlibatan masyarakat, dan proses pengambilan keputusan dalam demokrasi.

Data pengguna internet di Indonesia semakin meningkat, Indonesia menjadi negara penggunaan internet yang sangat tinggi, menjadi yang terbesar kedelapan secara global. Dapat dilihat dari data yang dilansir oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 sebagai berikut pada tabel 1.:

Tabel 1. Data Pengguna Internet (APJII, 2024)

Tahun	Jumlah Pengguna Internet
2020	196,71 juta orang
2021	210 juta orang
2022	215,63 juta orang
2023	221,5 juta orang
2024	221,56 juta orang

Jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221,56 juta orang tahun 2024. Angka ini setara dengan 79,5% dari total populasi penduduk Indonesia. Secara *tren*, jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya dalam beberapa tahun terakhir (APJII, 2024). Meningkatnya pengguna internet berbanding lurus dengan meningkatnya aktivitas pengguna media sosial (Zahrah & Dwiputra, 2023). Media sosial telah menjadi gaya hidup dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat meningkatnya pengguna internet akan berdampak pula pada fenomena etika digital warga negara yang memerlukan perhatian khusus (Nugraha, 2023). Namun, keadaan ideal tersebut berbanding terbalik dengan realita yang terjadi, masih banyak warga negara yang kurang memahami etika digital dalam menggunakan platform media sosial. Misalnya saja masih marak dalam penggunaan media digital penyampaian berita bohong (*hoax*), menjadi suatu informasi atau berita yang disampaikan tetapi masih belum tentu kebenarannya, adanya unsur penipuan atau bahkan menjadi pembohongan publik yang memiliki tujuan tertentu (Suharyanto, 2019). Meningkatnya jumlah pengguna media digital, semestinya berjalan seimbang dengan meningkatnya pemahaman warga negara mengenai etika digital. Fenomena etika digital kewargaan menjadi topik menarik untuk dibahas dalam kajian akademis terutama di dalam konteks kehidupan politik warga negara. Selain maraknya terjadi berita bohong, semakin meningkat pula fenomena ujaran kebencian dan saling menghujat satu sama lain sesama warga negara yang menggunakan media sosial. Tidak

hanya itu, penggunaan media sosial dalam menjalankan aktivitas politik menjadi sangat dominan, misalnya media di jadikan sebagai alat untuk manipulasi data, provokatif, dan saling, menjatuhkan satu sama lain.

Oleh karena itu, dari paparan kondisi idealitas dan realitas di atas menemukan *gap* permasalahan bagaimana strategi untuk membangun etika digital kewargaan yang sangat krusial untuk menjaga integritas proses politik dan demokrasi. Serta apa saja dampak minimnya etika digital kewargaan dalam kehidupan politik warga negara. Fenomena semacam ini menjadi alasan dalam membangun etika digital kewargaan untuk menunjang kehidupan politik yang sehat dan dinamis. Memberikan ruang bagi warga negara untuk menyuarakan opini mereka, mengorganisir gerakan sosial, dan mempengaruhi kebijakan publik.

Kemajuan teknologi saat ini memberikan tantangan dalam membangun etika digital kewargaan. Etika digital kewargaan dapat dikatakan sebagai prinsip dan nilai yang mengarahkan perilaku individu dalam ruang digital, terutama dalam konteks interaksi politik. Sehingga dalam konteks kehidupan politik, etika digital kewargaan mencakup tanggung jawab, penghormatan terhadap hak orang lain, transparansi, serta integritas dalam menyampaikan dan menerima informasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, pengumpulan data menggunakan studi literatur (studi pustaka) (Creswell & Miller, 2000). Membangun etika digital kewargaan dalam kehidupan politik warga negara menjadi sangat penting dan krusial karena etika digital kewargaan menjadi dasar dalam perkembangan proses politik yang dinamis. Hal ini ditunjukkan cukup banyak penelitian yang berkaitan dengan etika digital dalam proses politik. Kajian literatur digunakan sebagai metode penelitian untuk memperoleh data yang konkret. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber literatur yang diterbitkan dari tahun 2018 hingga 2024. Di dalam menganalisis isi merupakan salah satu teknik penelitian yang banyak digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan humaniora (McMillan, 2012). Proses menganalisis isi merupakan metode yang mempelajari isi teks tertulis, artefak, gambar, dan rekaman (Creswell, 2015). Seluruh artikel diakses dari 30 November 2024 sampai 30 Desember 2024 melalui berbagai

sumber seperti *google scholar*, *research gate*, buku-buku, dan jurnal nasional dan internasional yang dianggap relevan dengan variabel. Istilah yang digunakan ‘etika digital’, ‘kewarganegaraan digital’, dan ‘kehidupan politik warga negara’. Selama proses menelaah dokumen, artikel-artikel yang berkaitan dengan kata kunci yang disebutkan di atas diunduh dan ditelaah satu per satu oleh peneliti. Tiga puluh lima artikel, buku, dan sumber referensi lain yang berfokus pada etika digital kewargaan ditinjau secara menyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN KEWARGAAN DIGITAL (*DIGITAL CITIZENSHIP*)

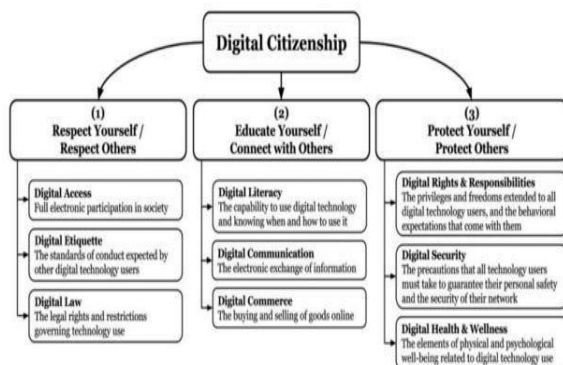
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal yang sangat penting bagi partisipasi dan pembangunan masyarakat, hal ini guna membentuk kewargaan digital sehingga memerlukan perhatian dalam wacana ini (Chelala, 2018; Hidayah dkk., 2023). Menurut Mossberger memberikan gambaran bahwa kewarganegaraan digital dipandang sebagai kemampuan warga negara untuk berpartisipasi dalam komunitas masyarakat secara online (Mossberger dkk., 2008). Menurut Ohler (2010), kewarganegaraan digital berkaitan erat dengan isu-isu komunitas lokal, global, dan online. Kewarganegaraan digital pada dasarnya melibatkan pemahaman peluang dan tanggung jawab di era digital. Dari beberapa pendapat diatas memberikan gambaran bahwa kewargaan digital menjadi hal yang sangat penting dalam perkembangan globalisasi saat ini. Warga negara menjadi paham dan melek digital terutama dalam kehidupan politik warga negara. Karena warga digital sering menggunakan teknologi, salah satunya menggunakan teknologi untuk informasi politik untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, artikel ini memberikan analisis yang sesuai dengan perkembangan saat ini termasuk hak dan tanggung jawab digital, partisipasi masyarakat, serta perilaku yang bertanggung jawab masyarakat.

Kewarganegaraan modern mencakup tantangan politik dan sosio-ekonomi yang kompleks (Isin dan Turner, 2002). Kewargaan digital dapat dilihat dari partisipasi politik menggunakan media sosial, berbagai pakar berpendapat bahwa media sosial telah menciptakan dasar bagi munculnya bentuk-bentuk pengorganisasian sosial baru yang horizontal, yang akan merombak struktur

politik dan ekonomi yang ada (Benkler, 2007; Castells, 2012; Shirky, 2008). Konsep kewargaan digital secara komprehensif dapat menjadi hal yang perlu didiskusikan dan dikaji dalam kajian akademis. Termasuk dalam artikel ini membahas topik yang cukup menarik berkaitan dengan etika kewargaan digital dalam kehidupan politik warga negara.

Kewargaan digital telah dikaji dalam pendapat (Choi dkk., 2017; Jones & Mitchell, 2016). Misalnya saja Jones dan Mitchell (2016) menjelaskan kewarganegaraan digital dengan landasan literasi digital yang berfokus pada (1) perilaku hormat secara online dan (2) keterlibatan masyarakat secara online. Sebaliknya, Choi dkk., (2017) melakukan pendekatan terhadap konsep tersebut dari perspektif kewarganegaraan demokratis bahwa di era Internet saat ini warga negara dapat mengeksplorasi hal yang penting secara politis. Kewargaan digital dapat menjadi panduan termediasinya perilaku individu sehingga semua orang dapat memperoleh manfaat dalam masyarakat digital (Ribble, 2015).

Kerangka kewarganegaraan digital (Ribble & Miller, 2013) disajikan dalam gambar 1.

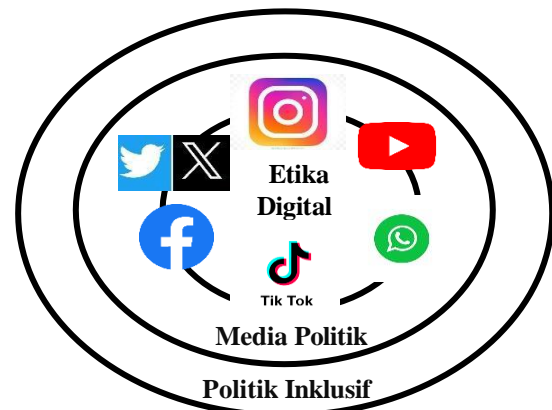


Gambar 1. Kerangka kewarganegaraan

Komponen kewarganegaraan digital yang paling terfokus yaitu, konseptualisasi kewarganegaraan digital yang didefinisikan sebagai norma perilaku yang berhubungan dengan penggunaan teknologi (Ribble dkk., 2004). Dalam proses membentuk etika digital kewarganegaraan kurang lebih ada tiga hal yang *pertama*, bagaimana warga negara dapat menghormati orang lain melalui akses digital, etiket digital, dan melalui hukum digital. *Kedua*, bagaimana warga negara untuk mendidik diri sendiri atau dapat diartikan sebagai kesadaran melalui literasi digital dan komunikasi digital *Ketiga*, bagaimana warga negara dapat melindungi orang lain baik dari segi data dan hal-

hal yang bersifat privasi melalui menghargai hak-hak digital orang lain, keamanan data digital, dan kesehatan mental.

Dalam beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia masih cukup banyak pengguna media yang belum paham etika bermedia sehingga menimbulkan problematika digital yang dapat menjadi tantangan digital saat ini, netizen yang saling menghujat sampai *bullying* yang terjadi dalam media sosial, bahkan media sosial seringkali menjadi alat politik tertentu yang dapat menguntungkan sekelompok orang.



Gambar 2. Etika Digital

Penggunaan media sosial sebagai alat politik perlu di dasarkan pada etika digital kewargaan, hal ini untuk menciptakan situasi politik yang inklusif. Kewargaan digital suatu pemahaman posisi warga negara dalam penggunaan media termasuk keterlibatan dalam politik menggunakan media sosial sebagai alat dan mengetahui etika yang baik sebagai warga negara yang melek digital. Kewargaan digital juga dapat dipahami sebagai konsep untuk menggambarkan perilaku warga negara yang menunjukkan tanggung jawab, kepedulian, dan empati ketika menggunakan teknologi digital hal ini untuk menciptakan kehidupan politik yang inklusif dan terbuka untuk meminimalisir polarisasi politik.

## DAMPAK MINIMNYA ETIKA DIGITAL KEWARGAAN

### Dinamika Interaksi Politik di Media Sosial

Salah satu alasan pembicaraan politik digital melekat dalam rutinitas sehari-hari masyarakat karena sebagian besar pengguna kini mengakses internet melalui perangkat seluler (*handphone*) (Vaccari & Valeriani, 2018). Valeriani dan Vaccari (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa masyarakat

saat ini memiliki implikasi yang relevan dalam ekspresi dan percakapan politik melalui media sosial. Era digital menggambarkan bahwa media sosial telah menjadi platform utama bagi individu, organisasi partai politik, dan pemerintah untuk berinteraksi dan menyampaikan pesan politik. Ruang media sosial menjadi tempat untuk debat, diskusi, dan penyebaran informasi dengan cepat. Terbukanya ruang media sosial saat ini menjadikan dinamika interaksi politik di media sosial juga memiliki karakteristik yang kompleks. Pada bagian artikel ini akan membahas bagaimana teknologi mengubah interaksi politik dalam masyarakat sehingga etika digital kewargaan terutama dalam kehidupan politik warga negara perlu menjadi pembahasan yang penting.

Hubungan antara teknologi dalam hal ini adalah internet dan keterlibatan warga negara memiliki latar belakang sejarah yang kompleks dan tidak dapat diprediksi, yang ditentukan oleh keterkaitan antara penggunaan teknologi di satu sisi dan munculnya tindakan penggunaan media sebagai alat politik baru dalam gerakan politik di sisi lain (Castells, 1997; Juris, 2008). Beberapa kelompok masyarakat dan bahkan terafiliasi dalam partai politik menggunakan konsep “kiri siber” untuk menggambarkan bagaimana gerakan sosial-politik dalam 20 tahun terakhir dibentuk oleh logika politik yang menggabungkan jaringan sebagai struktur organisasi, praktik demokrasi partisipatif dalam pengambilan keputusan, dan penggunaan teknologi internet sebagai agen pengikat (Wolfson, 2014). Melalui media digital kita dapat melihat sejauh mana warga negara terlibat dalam urusan politik, menuntut untuk menjadi bagian dari pengambilan keputusan politik, tercermin dalam munculnya partai-partai politik yang bersifat *bottom-up* dan sebagian besar cenderung populis yang mampu menarik massa dalam jumlah besar, bentuk partisipasi tersebut seringkali bergantung pada wacana melalui media sosial, selain itu populisme dapat membawa risiko menimbulkan ketegangan dalam masyarakat (Fenton, 2016; Randiawan dkk., 2023). Dinamika dalam interaksi politik di media sosial seringkali menggambarkan fenomena negatif dari pada hal yang positif. Hal tersebut di pengaruhi oleh ketidakpahaman warga negara mengenai etika digital.

Interaksi politik yang dimaksud dalam artikel ini yaitu interaksi yang bersifat politis melalui media sosial yang cenderung negatif dan provokatif. Hal yang menjadi poin penting

dalam pembahasan artikel ini bahwa media sosial menjadi alat politik yang dapat menimbulkan perpecahan atau konflik dalam masyarakat jika pesan-pesan politik yang disampaikan melalui media sosial cenderung provokatif. Sehingga, asumsi bahwa media sosial menjadi alat politik itu benar. Media sosial dapat menjadi alat politik merupakan hal yang wajar-wajar saja, selama media sosial di orientasikan untuk aktivitas-aktivitas politik yang inklusif bukan menjadi alat politik yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

Interaksi melalui media sosial memainkan peran penting dalam membangun gerakan sosial, hal ini menjadi fakta bahwa ponsel pintar bersifat pribadi, tetapi selalu terhubung, dan dapat diakses (Turkle, 2008). Melalui ekspresi dan tindakan kolektif dalam strategi politik kontroversial, komunikasi melalui media sosial memungkinkan sirkulasi informasi dan gambar mengenai mobilisasi dan taktik (Neumayer & Stald, 2014; Penney & Dadas, 2014). Oleh karena itu, dalam memahami keterlibatan partisipasi masyarakat melalui media sosial, banyak muncul bentuk pengorganisasian politik baru di tingkat akar rumput, kita perlu menghindari godaan untuk menganut optimisme teknologi yang tidak berdasar. Sebaliknya, kita harus mengandalkan pemahaman bahwa jika media sosial dapat dianggap sebagai alat fundamental dalam mobilisasi dan pengorganisasian keterlibatan masyarakat dan protes sosial, maka media sosial juga perlu dipahami sebagai teknologi yang bermasalah dalam tindakan politik (Barassi, 2016).

Dinamika interaksi politik di media sosial menjadi fenomena yang kompleks dalam perkembangan digital saat ini dengan berbagai dampak positif dan negatif. Sementara media sosial memungkinkan partisipasi yang lebih inklusif dan mobilisasi yang cepat, tantangan seperti polarisasi dan penyebaran disinformasi.

Karakteristik mendasar yang dapat dipahami untuk membedakan aktivisme media sosial dengan bentuk keterlibatan masyarakat yaitu *Pertama*, partisipasi politik di media sosial sangat bersifat personal, karena menjadi hak setiap orang (Bennett & Segerberg, 2012; Fenton & Barassi, 2011). Karena menjadi hak individu warga negara maka personalisasi dapat diekspresikan melalui dua proses yang berbeda seperti 1) individu bergantung pada jaringan pribadi untuk mengumpulkan dan berbagi informasi, memobilisasi, dan berorganisasi. 2)

individu menampilkan narasi identitas dirinya melalui produksi postingan, komentar, dan gambar politik. *Kedua*, partisipasi politik di media sosial didasarkan pada logika visibilitas yang memiliki kemampuan melihat dan membaca konteks interaksi politik yang dilakukan, agar tidak masuk dalam polarisasi politik. Milan (2015) berpendapat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, fenomena media sosial menjadi alat politik dapat kita saksikan transisi politik, dari politik identitas menjadi politik visibilitas. Warga negara dan aktivis yang terlibat secara politik saat ini terus-menerus berbagi postingan dan informasi tentang pengalaman politik dan tindakan langsung mereka, serta agenda politik yang seringkali di praktikkan dan dipertontonkan melalui media sosial agar dapat dilihat dan dinilai langsung oleh masyarakat, dan hal-hal semacam ini kerap kali mendapatkan respon dari masyarakat sebagai politik pencitraan.

Penting kiranya bagi aktor politik, institusi politik dan masyarakat bertanggung jawab dalam mengelola interaksi politik ini guna menjaga integritas proses demokrasi dan mendorong diskusi yang sehat. Dinamika dalam interaksi politik dapat berdampak positif juga dapat berdampak negatif dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Dinamika interaksi dapat berdampak positif jika interaksi politik yang dilakukan berdasar pada edukasi dan etika digital kewargaan. Dan sebaliknya, akan berdampak negatif jika interaksi politik yang dilakukan menyampaikan pesan-pesan provokatif yang dilakukan oleh aktor politik, institusi politik tidak didasarkan pada etika politik.

### **Polarisasi Politik dan Kebencian di Media Sosial**

Polarisasi, sebagai fenomena sosial-politik yang kompleks dan sangat dinamis, polarisasi politik telah ada sejak awal sistem politik modern. Fenomena polarisasi politik ini berlaku untuk semua sistem politik demokratis, terutama di Indonesia, polarisasi politik telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, hal ini menjadi salah satu tantangan demokrasi di Indonesia. Dilihat dari sejarah Indonesia, polarisasi politik telah ada sejak lama antara Partai Islam, Partai Nasionalis, dan Partai Komunis. Setelah bertahun-tahun mereda, itu kembali bangkit ketika Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, yang menimbulkan polarisasi politik karena rivalitas politik. Seperti halnya konflik dalam masyarakat, polarisasi

politik merupakan sesuatu yang akan terus ada dalam suatu proses demokrasi (Fernando dkk, 2022). Polarisasi politik dapat dikatakan sebagai perbedaan politik yang semakin mendalam antara kelompok-kelompok yang memiliki identitas politik berbeda. Media sosial dapat memperburuk polarisasi ini dengan mempromosikan konten yang provokatif atau sensasional dan menciptakan ruang konflik (Tucker dkk., 2018). Dapat kita lihat seringkali, konten yang sensitif dan kontroversial mendapatkan lebih banyak perhatian, sehingga algoritma menyebarkannya lebih luas. Hal ini menyebabkan pandangan ekstrim menjadi lebih kuat dan mengurangi diskusi konstruktif antara kelompok-kelompok dengan pandangan berbeda (Interian dkk., 2022).

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dengan multipartai dan kondisi masyarakat yang heterogen menjadi sangat mudah untuk menjadi objek polarisasi politik dari berbagai oknum-oknum yang memiliki kepentingan tertentu. Media sosial menjadi salah satu alat untuk mempolarisasi masyarakat, karena dengan mudah dapat memobilisasi masyarakat dan mengarahkannya pada tujuan politik tertentu dari beberapa kelompok. Sehingga selain media sosial menjadi alat penting dalam proses komunikasi, interaksi sosial, dan untuk mendapatkan informasi pada era digital saat ini. Media sosial juga dapat dijadikan sebagai alat politik yang dengan mudah dapat di politisasi.

Interaksi melalui media sosial dapat memengaruhi opini publik dan perilaku politik. misalnya melalui *Facebook, Instagram, Tiktok, dan Twitter (X)* memungkinkan pengguna terlibat secara aktif dalam perdebatan politik dengan fitur interaktifnya seperti komentar, likes, dan cerita. Meskipun platform ini dapat membantu menyebarkan informasi politik secara cepat dan luas, mereka juga dapat menjadi tempat subur untuk hoaks dan disinformasi. Platform media sosial diatas memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi dan sikap politik masyarakat, jadi penting untuk memperhatikan dampak interaksi sosial di platform ini terhadap polarisasi politik. Polarisasi politik, yang ditunjukkan oleh perbedaan sikap dan perspektif politik yang semakin tajam di antara kelompok-kelompok tertentu, dapat sangat memengaruhi stabilitas sosial dan politik suatu negara. Sangat penting untuk memahami bagaimana interaksi sosial di media sosial mempengaruhi polarisasi politik.

Karena sangat penting untuk menemukan strategi yang dapat mengurangi kemungkinan konflik dan mendorong percakapan konstruktif (Sitorus, 2024). Media sosial menjadi tempat yang paling mudah bagi warga negara untuk berinteraksi baik interaksi yang positif maupun negatif. Media sosial juga menjadi tempat yang paling mudah untuk menyampaikan pesan-pesan politik yang berkonotasi provokatif dan mengundang masyarakat pengguna media untuk berkomentar yang tidak semestinya.

Polarisasi dapat dikatakan menjadi tindakan politik terbelahnya masyarakat dalam menyikapi suatu isu politik, yang biasanya terjadi karena perubahan sosio-kultural masyarakat dan munculnya elit politik baru. Polarisasi memiliki perbedaan preferensi politik atau partisan, Nolan McCarty menjelaskan bahwa partisan umumnya merupakan sikap wajar dan penting dalam demokrasi, sementara polarisasi lebih cenderung sebagai sesuatu yang tidak sehat bahkan dalam beberapa waktu terakhir polarisasi identik dengan hal-hal negatif seperti konflik, intoleransi dan ketegangan (McCarty, 2019). Polarisasi politik yang berkepanjangan membawa dampak buruk bagi keberlangsungan demokrasi di suatu negara, seperti yang dikemukakan Eve Warburton bahwa polarisasi dapat menggerus lembaga demokrasi dan merusak bangunan sosialnya (Warburton, 2020). Polarisasi politik dan ujaran kebencian di media sosial terbuka secara umum dan menjadi konsumsi publik sehingga dengan mudah memicu konflik yang terjadi antar kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan politik.

Fenomena polarisasi banyak terjadi di tataran grassroots atau masyarakat akar rumput dibandingkan di tingkat elit politik (Nashrullah, 2023). Polarisasi dan kebencian politik yang dimaksudkan dalam artikel ini adalah memobilisasi masyarakat untuk berkomentar dan saling menghujat satu sama lain dalam platform media sosial. Bisa saja polarisasi seperti ini untuk menutupi atau menggiring opini publik yang cenderung menyerang figur atau tokoh tertentu. Sehingga masyarakat termobilisasi bahkan terpolarisasi oleh keinginan pembuat opini publik yang bertujuan memecah belah masyarakat. Argumentasi penulis ini di dukung oleh pendapat Wilson yang mengemukakan bahwa polarisasi timbul karena adanya komitmen yang kuat terhadap suatu ideologi, budaya atau preferensi politik sehingga mengakibatkan terpecahnya suatu kelompok dengan kelompok lain. Polarisasi

mengakibatkan masing-masing kelompok memiliki anggapan pandangan serta prinsipnya yang paling benar, dan kelompok yang berseberangan dianggap salah (dalam Annas dkk., 2019).

Dinamika interaksi politik dan polarisasi politik menjadi dampak dari kurangnya etika digital kewargaan dalam kehidupan politik warga negara yang dengan mudah menjadi alat politik kelompok tertentu. Sehingga artikel ini menjadi referensi ilmiah dalam membangun etika digital kewargaan. Konsep etika digital kewargaan menjadi isu konsep kewargaan transnasional.

### STRATEGI MEMBANGUN ETIKA DIGITAL KEWARGAAN

Ruang digital telah menjadi wadah dalam melakukan interaksi sudah seharusnya memperhatikan etika digital yang dapat membantu mengatur batasan sikap dan perilaku dalam ruang media sosial. Jika dalam ruang sosial etika digital tidak diterapkan justru yang akan terjadi adalah tindakan *bullying*, berita palsu (*hoax*), pelecehan seksual secara verbal, pornografi, dan sampai pada ujaran kebencian (Shina dkk., 2021). Etika digital tidak hanya berkaitan dengan kepantasan dalam ruang digital, tetapi juga berkaitan dengan pertanggungjawaban. Apabila kita tidak berhati-hati dan menjaga etika saat berinteraksi dalam ruang media sosial, maka kita akan mendapatkan dampaknya. Lebih jauh dari itu, akan berhadapan dengan hukum dan menjadi masalah besar. Oleh karena itu, perlu kiranya menghindari hal tersebut setiap pengguna internet harus memahami dan membangun etika digital kewargaan. Strategi yang perlu di bangun dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini sekurang-kurangnya melalui pendidikan literasi digital, penyuluhan/pelatihan dan kolaborasi dengan *Influencer*.

Membangun etika digital kewargaan tentunya yang paling utama dilakukan melalui Pendidikan kewarganegaraan, sebagai upaya dalam melakukan penguatan literasi digital dalam lingkungan pendidikan formal. Peserta didik harus cerdas dan pandai dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh teknologi digital, seperti media sosial, google cendekia, dan lain sebagainya. Kunci utama di dalam penguatan *civic literacy* melalui literasi digital di dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu setiap peserta didik harus mampu mengoperasikan teknologi digital

(Widiatmaka & Kurniawan, 2023). Dalam membangun etika digital kewargaan yang paling efektif yaitu melalui lingkungan pendidikan formal. Misi dalam membangun etika digital kewargaan paling tepat dilakukan melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai bentuk penguatan literasi digital.

Menurut Shina (2021), setidaknya ada empat (4) pilar literasi digital, yaitu:

*Digital skills*, kecakapan digital sebagai bentuk pengetahuan dasar mengenai segala hal yang berkaitan dengan teknologi digital. *Digital culture*, budaya digital di perlu di bangun yang difokuskan kepada pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. *Digital ethics*, etika digital menjadi tindakan pengguna media sosial yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Etika digital tentunya tidak muncul begitu saja perlu adanya penguatan melalui pendidikan formal maupun informal dan di dasarkan pada pemahaman warga negara. Dan *Digital safety*, keamanan digital yang difokuskan kepada pengetahuan dasar mengenai proteksi identitas digital dan data pribadi di platform digital.

Apabila keempat pilar literasi digital tersebut kuat tertanam dalam diri setiap pengguna media sosial, maka kemungkinan besar kehidupan digital akan menjadi lebih baik dan lebih beradab (*civilized*). Tidak cukup jika hanya membangun pilar literasi (Ero dkk., 2024) perlu di topang dengan usaha lain misalnya melalui pelatihan dan penyuluhan. Membangun etika digital kewargaan perlu pemahaman dan praktik secara langsung dan perlu untuk di kolaborasikan dengan semua *stakeholders*.

Penyuluhan/Pelatihan ini dapat dilakukan melalui program-program untuk meningkatkan pemahaman tentang etika digital di sekolah, kampus, dan komunitas/organisasi. Penyuluhan ini dapat di kerjasamakan dengan kementerian/dinas komunikasi dan informasi. Topik yang dibahas dapat mencakup penguatan etika serta tanggung jawab sebagai pengguna media sosial. Misalnya bentuk-bentuk penyuluhan/pelatihan dalam membangun etika digital kewargaan digital melalui pelatihan komputer, penyuluhan pembentukan etika digital, penyuluhan dampak berita bohong (*hoax*). Bentuk penyuluhan dan pelatihan perlu untuk dibuatkan konten dengan para influencer, konten kreator, atau jurnalis sebagai orang yang aktif dalam dunia jurnalistik dan media sosial.

Membangun etika digital kewargaan perlu di dukung melalui sosialisasi dalam bentuk video- video pendek yang di buat dan berisikan pesan- pesan penting yang berkaitan dengan pembangunan etika digital kewargaan. Tidak cukup membangun etika digital kewargaan hanya melalui pendidikan formal perlu dilakukan upaya-upaya pendukung sebagai ikhtiar dalam membentuk etika dan tanggungjawab digital warga negara untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*good and smart citizenship*).

## SIMPULAN

Etika digital kewargaan dalam perkembangan kehidupan politik warga negara menjadi hal yang cukup penting dan perlu untuk di bangun guna membentuk ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti bijak dalam bermedia sosial, meningkatkan literasi digital, dan melindungi data-data pribadi, serta mengintegrasikannya dalam pendidikan dan sosialisasi masyarakat, diharapkan dapat terbentuk masyarakat yang lebih sadar, toleran, dan bijak dalam penggunaan media sosial. Hal ini akan meminimalkan potensi konflik dan polarisasi, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi dan keterlibatan politik yang inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Y. D. (2021). Cerita Netiket Masyarakat Digital. Dalam Kusumastuti, F. dkk. (2021). Modul Etis Bermedia Digital. Jakarta: Kominfo.
- Benkler, Y. (2007). Kekayaan jaringan: Bagaimana produksi sosial mengubah pasar dan kebebasan. New Haven, CT: Pers Universitas Yale.
- Castells, Manuel. (1996). The Rise of the Network Society. Castells. Oxford, UK: Blackwell.
- Castells, M. (1997). Kekuatan identitas. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- Castells, M. (2012). Jaringan kemarahan dan harapan: Gerakan sosial di era internet. Cambridge, Inggris: Polity Press.
- Creswell, J. W. (2015). Riset Pendidikan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif (Kelima). Pustaka Pelajar.
- Giddens, Anthony (1990) The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press.
- Held, David. (1995). Democracy and the Global Order: From the Modern State to

- Cosmopolitan Governance. California: Stanford University Press.
- Isin, E & Turner, B. (2002). Studi kewarganegaraan: sebuah pengantar. Dalam: Buku Panduan Studi Kewarganegaraan (eds). London: Bijaksana, hal 1-10.
- Juris, J. (2008). Masa depan jaringan: Gerakan melawan globalisasi perusahaan. Durham, NC: Duke University Press.
- Kusumastuti, F. dkk. (2021). Modul Etis Bermedia Digital. Jakarta: Kominfo.
- Shina, A. F. I., dkk (2021). Modul indonesia cakap digital: Pendekatan Integrasi-Interkoneksi Keislaman. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Syrky, C. (2008). Inilah saatnya: Kekuatan pengorganisasian tanpa organisasi. New York, NY: Buku Penguin.
- Turkle, S. (2008). Always-on/always- on-you: The tethered self. In J. Katz (Ed.), Handbook of mobile communication studies. Cambridge, UK: MIT Press.
- McCarty, Nolan. (2019). Polarization: What Everyone Needs to Know. England: Oxford University Press.
- McMillan, J. H. (2012). Educational Research: Fundamentals for the Consume. Pearson.
- Mossberger K, Tolbert CJ dan McNeal RS. (2008). Digital Citizenship: Internet, Society, and Participation. Cambridge, MA: MIT Press.
- Ohler, JB. (2010). Komunitas Digital, Warga Digital. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- Waburton, Eve. (2020). Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?. ISEAS: Yusof Ishak Institute.
- Wolfson, T. (2014). Pemberontakan digital: Lahirnya kaum kiri dunia maya. Urbana: Pers Universitas Illinois.
- Afriansyah, A. G. K., Asmaroini, A. P., & Cahyono, H. (2024). Implementasi dimensi kebhinekaan global dalam pendidikan karakter di SMPN 2 Kecamatan Pulung, Ponorogo. *Implementasi Dimensi Kebhinekaan Global Dalam Pendidikan Karakter di SMPN 2 Kecamatan Pulung, Ponorogo*, 9(1), 84-92. DOI : [10.24269/jpk.v9.n1.2024.pp84-92](https://doi.org/10.24269/jpk.v9.n1.2024.pp84-92)
- Annas, F. B., Petranto, H. N., & Pramayoga, A. A. (2019). Opini Publik Dalam Polarisasi Politik di Media Sosial. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)*, 20(2), 111. DOI: <https://doi.org/10.31346/jpikom.v20i2.2006>
- Baruch, A. F., & Erstad, O. (2018). Upbringing in a digital world: Opportunities and possibilities. *Journal: Technology, Knowledge and Learning*, 23(3),377–390.DOI: <https://doi.org/10.1007/S10758-018-9386-8/METRICS>
- Barassi, Veronica. (2016). A Recorded Citizen? Social Media Activism, Digital Footprints and the Question of Political Profiling. *Journal Communication in the public*, 1(4). 494–499. DOI: <https://doi.org/10.1177/2057047316683200>
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). Logika tindakan penghubung. *Informasi, Komunikasi & Masyarakat*, 15, 739–768. DOI: <https://doi.org/10.1080/1369118X.201.670661>
- Brough, M., Lapsansky, C., Gonzalez, C., Stokes, B., & Bar, F. (2018). Mobile Voices: Design as a method to explore the possibilities and limitations of community participation. *Journal: Mobile Media & Communication*, 6(2), 247–265. DOI: <https://doi.org/10.1177/2050157917737812>
- Chelala, Ghosn. M. (2018). Exploring continuous learning and digital citizenship practices: Educational and place-based challenges. *Journal of Education, Citizenship and Social Justice*, 1-17. DOI: <https://doi.org/10.1177/1746197918759155>
- Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the internetage. *Theory & Research in Social Education*, 44(4), 565–607. DOI: <https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549>
- Choi M, Glassman M, & Cristol, D. (2017). What it means to be a citizen in the internet age: Development of a reliable and valid digital citizenship scale. *Journal Computers & Education*, 107, 100–112.

- Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry. *Theory Into Practice*, 39(3), 124–130. DOI: [https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903\\_2](https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2)
- Ero, P. E. L., Bandong, I., & Mustadi, A. (2024). Penguatan Literasi Budaya dan Kewargaan Melalui Bahan Ajar Berbasis Kearifan Lokal Toraja. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 9(1), 12-20. DOI : [10.24269/jpk.v9.n1.2024.pp12-20](https://doi.org/10.24269/jpk.v9.n1.2024.pp12-20)
- Fenton, N., & Barassi, V. (2011). Alternative media and social networking sites: The politics of individuation and political participation. *Journal of Communication Review*, 14, 179–196. DOI: <https://doi.org/10.1080/10714421.2011.597245>
- Fernando, Z. J., Pratiwi, W., & Saifulloh, P. P. A. (2022). Model penanaman nilai-nilai pancasila dalam menghadapi ancaman polarisasi politik pemilu 2024 di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*. 120-132.
- Hanafi, Zaki. T & Ardianto, Budi. (2024). Transformasi Konsep Kewarganegaraan di Era Digital: Implikasi Sosial, Etis, dan Masa Depan. *Jurnal: Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*. Vol 2. No. 2. Hal. 228-232. DOI: <https://doi.org/10.59024/jis.v2i2.786>
- Hidayah, Y., Kurniawan, I. D., & Ginusti, G. N. (2023). Penggunaan literasi informasi untuk pengembangan watak kewarganegaraan: interaksi antara pendidikan kewarganegaraan, teknologi dan bahasa. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 8(1), 65-75. DOI : [10.24269/jpk.v8.n1.2023.pp65-75](https://doi.org/10.24269/jpk.v8.n1.2023.pp65-75)
- Interian, R., Marzo, R. G., Mendoza, I., & Ribeiro, C. C. (2022). Network Polarization, Filter Bubbles, and Echo Chambers: An Annotated Review of Measures and Reduction Methods. DOI: <https://doi.org/10.1111/itor.13224>
- Jakak, P. M., Rifa'i, M. N., & Azizah, B. (2023). Peranan Pancasila dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Era Gelobalisasi. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 8(1), 11-21. DOI : [10.24269/jpk.v8.n1.2023.pp11-21](https://doi.org/10.24269/jpk.v8.n1.2023.pp11-21)
- Jones, L. M & Mitchell, K. J. (2016). Defining and measuring youth digital citizenship. *Journal New Media & Society*, 18(9), 2063–2079.
- Khairunisa, W., Febrian, A., Sundawa, D., & Rahmat, R. (2024). Membangun Keadaban Digitalisasi Warga Negara Indonesia dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 4(01), 1-8. DOI: <https://doi.org/10.57008/jjp.v4i01.675>
- Randiawan, R., Suryadi, K., & Bestari, P. (2023). Analysis of the construction of the meaning of political populism as phenomenology in the perspective of civic education. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 8(3), 419-430. DOI: <https://doi.org/10.26618/jed.v8i3.11236>
- Rejeki, S., Suci, A. W., Ramadhan, R., Amanullah, A., Adisetiawan, I., & Am Andesa, L. A. (2025, July). Kewarganegaraan Digital: Tantangan Etika di Dunia Maya. In *Education, Social Sciences, and Linguistics: Conference Series* (Vol. 1, No. 2, pp. 63-70).
- Ribble, M. (2015). *Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know*, 3rd ed. Oregon: International Society for Technology in Education.
- Ribble M., Bailey, G., & Ross, TW. (2004). Digital citizenship: Addressing appropriate technology behavior. *Journal Learning and Leading with Technology*, 32, 6–11.
- Roza, P. (2020). Digital citizenship: menyiapkan generasi milenial menjadi warga negara demokratis di abad digital. *Jurnal Sositoteknologi*, 19(2), 190-202.
- Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.
- Setiawan, I., Cempaka, F. G., & Reksoprodjo, Y. (2024). Pancasila sebagai landasan gen z dalam mempertahankan nilai persatuan pada era globalisasi. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 9(1), 54-65. DOI : [10.24269/jpk.v9.n1.2024.pp54-65](https://doi.org/10.24269/jpk.v9.n1.2024.pp54-65)
- Suharyanto, Cosmas. Eko. (2019). Analisis Berita Hoaks Di Era Post- Truth: Sebuah Review. *Masyarakat Telematika Dan*

- Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 10(2):37. DOI: <https://doi.org/10.17933/mti.v10i2.15>
- Sitorus, Junaice. H., Tanoyo, M., & Irwansyah. (2024). Polarisasi politik melalui interaksi sosial di instagram: studi kasus pemilu 2024 di Indonesia, *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 4(2), 383-394 DOI : <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i2.1675>
- Tucker, J., Guess, A., Barbera, P., Vaccari, C., Siegel, A., Sanovich, S., Stukal, D., & Nyhan, B. (2018). Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature. *SSRN Electronic Journal*. DOI: <https://doi.org/10.2139/ssrn.3144139>
- Matang & Riyanti, D. (2023). Kewargaan Digital Dalam Membentuk Nasionalisme Mahasiswa Di Era Digital. *Journal of Humanities and Civic Education*, 1(1), 9-16.
- Mustari & Hashfi, Hadyan. (2024). Penguatan Pendidikan Karakter Pada Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Di Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Pendidikan PEPATUDZU Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, 20(1), 1-27.
- Milan, S. (2015). Mobilisasi di Era Media Sosial: Dari Politik Identitas ke Politik Visibilitas. Dalam L. Dencik & O. Leistert (Eds.), *Perspektif Kritis tentang Media Sosial dan Protes: Antara Kontrol dan Emansipasi* (hlm. 53–73). New York: Rowman & Littlefield Internasional.
- Nashrullah, Jauhar. (2023). Polarisasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Realism: Law Review*, 1(2), 20-38.
- Neumayer, C., & Stald, G. (2014). The mobile phone in street pro-test: Texting, tweeting, tracking, and tracing. *Journal Mobile Media & Communication*, 2, 117-133.
- Nugraha, Satria. H. (2023). Paradigma Etika Digital Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2412-2425.
- Nur, Emislyah. (2020). Tanggapan Generasi Z Terhadap Pemanfaatan Media Sosial Dalam Mendukung Keterlibatan Dalam Pemilu Legislatif 2019. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 24(2) DOI: <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v24i2.122>
- Nursetiani, A, Aprilia, D. C., Sulistyaningsih, I. D., Gunafi, I. G., Ferahma, S. V. (2024). Pendidikan Politik pada Generasi Milenial : Membangun Kesadaran Demokratis di Era Digital. *Jurnal Pena Edukasia*. 2(2), 49-53.
- Literat, I., & Brough, M. (2019). From Ethical to Equitable Social Media Technologies: Amplifying Underrepresented Youth Voices in Digital Technology Design. *Journal of Media Ethics: Exploring Questions of Media Morality*, 34(3), 132–145. DOI: <https://doi.org/10.1080/23736992.2019.1638259>
- Penney, J., & Dadas, C. (2014). (Re)Tweeting in the service of protest: Digital composition and circulation in the occupy wall street movement. *Journal New Media & Society*, 16, 74- 90.
- Vaccari, C., & Valeriani, A. (2018). Digital Political Talk and Political Participation: Comparing Established and Third Wave Democracies. *Journal Special Collection: SMA PP Global Special Issue Sage Open*, 2018, 1-14. DOI: <https://doi.org/10.1177/2158244018784986>
- Valeriani, A., & Vaccari, C. (2017). Political talk on mobile instant messaging services: A comparative analysis of Germany, Italy, and the UK. *Journal Information, Communication & Society*. Advance online publication. DOI: <https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1350730>
- Widiatmaka, P & Kurniawan, D. I. (2023). Peningkatan civic literasi dengan memanfaatkan literasi digital melalui pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Jurnal Pekommas*. 8(1), 59-70.
- Zahrah, F., & Dwiputra, R. (2023). Digital citizens: Efforts to accelerate digital transformation. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 1-11.